

**PERANAN USAHA KECIL DAN MENENGAH DALAM PENYERAPAN TENAGA KERJA DAN TINGKAT PENDAPATAN MASYARAKAT MISKIN DI KECAMATAN ABIANSEMAL KABUPATEN BADUNG**

**I Wayan Wenagama**

Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Udayana

Email: iwayansudemen@yahoo.co.id

**Abstract: The Role Of Small And Medium Enterprises In Employment Absorption And Income Level Of The Poor In Abiansemal District – Badung Regency.** This research studied poor households who work in SMEs in Abiansemal District – Badung Regency. 18 villages (90 respondents) are choosed by using simple random sampling with Frank Lynnch formula. Analysis used in this research was descriptive comparatif. The results showed that most respondent's education level was elementary school and the lowest was vocational school The amount of labour were absorbed mostly in the agricultural sector by 30 respondents which was followed from the construction workers by 17 respondents from trade sector and wood craftsmen each 10 respondents, the lowest was the store buildings on labuor, labour tractors and craft workers cloves each 1 respondent . SMEs only absorbed 50 respondents (55.56%). Respondents who used the full time works was 78 respondents Respondents who receive above the minimum wage were 26 respondents and those earning below the minimum wage were 64 respondents

**Key words:** SMEs and poverty

**Abstrak : Peranan Usaha Kecil Dan Menengah Dalam Penyerapan Tenaga Kerja Dan Tingkat Pendapatan Masyarakat Miskin Di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung.** Penelitian ini meneliti rumah tangga miskin yang bekerja di sektor UKM di Kecamatan Abiansemal, Badung. Diteliti 18 desa (90 responden) yang ditentukan dengan teknik *simple random sampling* dan rumus *Frank Lynnch*. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan responden terbanyak adalah SD dan terkecil adalah SMK. Jumlah tenaga kerja terserap pada sektor pertanian sebanyak 30 responden buruh bangunan sebesar 17 responden sektor perdagangan dan pengerajin kayu masing-masing 10 responden dan pada buruh toko bangunan, buruh traktor, dan pekerja kerajinan cengkeh masing-masing 1 responden. Penyerapan tenaga kerja pada UMKM sebesar 50 responden Waktu bekerja dari responden menunjukkan bahwa 78 responden memanfaatkan waktu secara penuh. Responden yang menerima upah diatas upah minimum adalah 26 responden dan yang menerima upah dibawah upah minimum adalah sebanyak 64 responden

**Kata kunci :** UKM dan kemiskinan

## PENDAHULUAN

Upaya menurunkan tingkat kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja perlu diupayakan untuk meningkatkan pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM). Produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh para pengusaha kecil dan menengah (UKM) di Kabupaten Badung tersebar di 6 wilayah kecamatan, namun terdapat konsentrasi yang lebih besar pada 2 kecamatan yaitu wilayah Kecamatan Abiansemal dan wilayah Kecamatan Mengwi. Keberhasilan para pengusaha di wilayah Kabupaten Badung dalam mendapatkan segmen pasar akan sangat ditentukan oleh lingkungan produksi dimana produk tersebut dihasilkan, ketersediaan bahan baku, teknologi, serta

organisasi perusahaan yang menghasilkan barang tersebut. Pada berbagai produk hasil pertanian dan industri rumah tangga, pengusaha local hanya akan mampu mengisi kebutuhan pasar domestik apabila harga barang yang mereka tawarkan bisa bersaing dengan aneka produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh para pengusaha diluar daerah Bali melalui kegiatan perdagangan daerah antar pulau.

Pengusaha lokal berskala kecil yang tergolong dalam kelompok usaha kecil dan menengah di wilayah Kabupaten Badung, memiliki peranan yang sangat strategis, tidak saja berkaitan dengan upaya pembentukan pendapatan masyarakat, tetapi juga berkaitan dengan terciptanya lapangan

pekerjaan yang lebih luas. Dengan demikian, untuk kepentingan pengembangan otonomi daerah Bali, maka usaha kecil dan menengah (UKM) memiliki peranan yang relative strategis dalam konteks pengembangan potensi produksi daerah.

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, oleh karena selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Dalam krisis ekonomi yang terjadi di negara kita sejak beberapa waktu yang lalu, dimana banyak usaha berskala besar yang mengalami stagnasi bahkan berhenti aktifitasnya, sector UKM terbukti lebih tangguh dalam menghadapi krisis tersebut. Pemberdayaan UKM perlu mendapatkan perhatian yang besar baik dari pemerintah maupun masyarakat agar dapat berkembang lebih kompetitif bersama pelaku ekonomi lainnya. Menurut Kementerian Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menekop dan UKM, 2005), bahwa yang dimaksud dengan Usaha Kecil (UK), termasuk Usaha Mikro (UMI), adalah entitas usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000. Sementara itu, Usaha Menengah (UM) merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 200.000.000 s.d. Rp 10.000.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan

Kebijakan pemerintah kedepan perlu diupayakan lebih kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya UKM. Pemerintah perlu meningkatkan perannya dalam memberdayakan UKM disamping mengembangkan kemitraan usaha yang saling menguntungkan antara pengusaha besar dengan pengusaha kecil, dan meningkatkan kualitas Pengertian pemberdayaan

(*empowerment*) sedangkan pemberdayaan adalah pemberian tanggungjawab dan wewenang terhadap pekerjaan untuk mengambil keputusan semua pengembangan produk dan pengambilan keputusan. Kabupaten Badung yang merupakan daerah pariwisata yang potensial di Provinsi Bali, yang sangat memungkinkan untuk mendorong UKM.

## KAJIAN PUSTAKA

Menurut teori Okun menyatakan bahwa hubungan antara pengangguran dan GDP riil tercermin pada para pekerja membantu memproduksi barang dan jasa, sedangkan para penganggur tidak membantu memproduksi barang dan jasa. Peningkatan dalam tingkat pengangguran seharusnya dikaitkan dengan penurunan dalam GDP riil. Hubungan negatif di antara pengangguran dan GDP riil ini disebut hukum Okun (Okun law), setelah Arthur Okun ekonom yang pertama kali mempelajarinya. Dengan mempergunakan data departemen perdagangan AS, dan Departemen Tenaga kerja AS, ditemukan hubungan dalam prosedur statistic (OLS), menyatakan bahwa perubahan persentase dalam GDP riil adalah sama dengan 3% - 2 kali perubahan dalam tingkat pengangguran. Jika tingkat pengangguran tetap sama, GDP riil tumbuh sampai kira-kira 3%, pertumbuhan normal ini mengacu ke tingkat pertumbuhan populasi, akumulasi modal, dan kemajuan teknologi. Selain itu untuk setiap poin persentase tingkat pengangguran naik dari 6% menjadi 8%, maka GDP riil ini akan menjadi perubahan persentase dalam GDP riil sebesar  $3\% - 2 \times (8\% - 6\%) = -1\%$ . Dalam kasus ini, hukum Okun mengatakan bahwa GDP akan turun sampai 1%, yang mengindikasikan perekonomian an sedang mengalami resesi.

Perkembangan jumlah angkatan kerja, bekerja dan jumlah pengangguran di Kabupaten Badung periode tahun 2005– 2009 disajikan dalam Tabel 1 berikut.

**Tabel 1. Perkembangan Angkatan Kerja, Bekerja dan Menganggur di Kabupaten Badung Tahun 2005 - 2009**

| No | Indikator              | Tahun            |                 |                 |                 |                 |
|----|------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    |                        | 2005             | 2006            | 2007            | 2008            | 2009            |
| 1  | Angkatan kerja         | 228.940          | 232.437         | 233.807         | 234.599         | 238.087         |
| 2  | Bekerja                | 216.360          | 226.946         | 224.841         | 227.091         | 231.073         |
| 3  | Menganggur<br>(Persen) | 12.580<br>(5.49) | 5.491<br>(2.36) | 8.966<br>(3.83) | 7.508<br>(3,20) | 7.014<br>(2.95) |

Sumber data : Profil Badung tahun 2005 -2009

Tabel 1 menunjukkan bahwa angkatan kerja yang bekerja di Kabupaten badung mengalami peningkatan dari tahun 2005 sebanyak 216.360 dan tahun 2009 sebanyak 231.073. Di sisi lain angkatan kerja yang menganggur mengalami penurunan yaitu 5,49 persen thun 2005 dan turun menjadi 2,95 persen tahun 2009. Penurunan pngangguran tersebut diakibatkan terserap nya angkatan kerja di UKM pada masing-masing Kecamatan di Kabupaten Badung.

Berdasarkan hasil penelitian tahun 2009 dari Pemerintah Kabupaten Badung bekerja sama dengan Fakultas Ekonomi Universitas Udayana, data potensi usaha kecil dan menengah di wilayah 6 kecamatan disajikan pada Tabel 2. Ternyata kecamatan Abiansemal menempati urutan jumlah sebaran UKM terbesar, disusul oleh Kecamatan Mengwi, Kuta Utara, Kuta Selatan, Kuta Tengah dan terakhir Kecamatan Petang yang dapat disajikan di Tabel 2.

**Tabel 2. Jumlah UKM Kabupaten Badung Tahun 2009**

| Urutan | Nama Kecamatan       | Jumlah | %      |
|--------|----------------------|--------|--------|
| 1      | Kuta Selatan         | 991    | 11.39  |
| 2      | Kuta Tengah          | 852    | 9.79   |
| 3      | Kuta Utara           | 1142   | 13.13  |
| 4      | Mengwi               | 2428   | 27.91  |
| 5      | Abiansemal           | 2542   | 29.22  |
| 6      | Petang               | 745    | 8.56   |
|        | Jumlah Pengusaha UKM | 8700   | 100.00 |

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM, 2009.

Jumlah UKM seluruhnya yang tersebar di 6 wilayah kecamatan di Kabupaten Badung sebesar 8.700 yang tercatat dari inventarisasi data UKM pada tahun 2009. Data tersebut diatas diperkirakan tidak mengalami perubahan yang cukup berarti pada tahun 2010.

Berdasarkan data inventarisasi yang diperoleh dari laporan hasil penelitian Pemkab Badung dengan Fakultas Ekonomi Universitas Udayana pada tahun 2009 tersebut, diperoleh gambaran bahwa sektor jasa perdagangan menggambarkan sektor terbesar yang menjadi bidang usaha kecil dan menengah. Dengan gambaran ini dapat dinyatakan bahwa sektor UKM di Kabupaten Badung belum memiliki basis produksi khususnya yang bertipe industri, sehingga angka penyerapan tenaga kerja menjadi lebih terbatas di sektor perdagangan

dibandingkan dengan pertumbuhan sektor industri.

Meskipun demikian, perkembangan usaha kecil dan menengah di sektor perdagangan tetap merupakan alternatif yang cukup startegis dalam membentuk kesempatan berusaha dan pembentukan pendapatan di tingkat masyarakat pengusaha. Penelitian ini berusaha untuk mendapatkan gambaran tentang pnyerapan tenaga kerja dan pendapatan dari pengembangan UKM para penduduk miskin. Berdasarkan latar belakang penelitian sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat dikemukakan pokok masalah penelitian sebagai berikut: 1) bagaimana penyerapan tenaga kerja dari usaha kecil dan menengah (UKM) bagi penduduk miskin di Kecamatan Abiasemal?; 2) Bagaimana pendapatan dari para pekerja usaha kecil dan menengah

(UKM) bagi penduduk miskin di Kecamatan Abiasemal?

### METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung, dengan pertimbangan bahwa di daerah ini masih banyak terdapat rumah tangga miskin dan obyek penelitian ini mempergunakan obyek rumah tangga miskin yang bekerja di UKM yang tersebar di wilayah Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung.

Sampel penelitian ditentukan dengan mempergunakan *simple random sampling* dengan menggunakan rumus *Frank Lynch* (Gama 2000,397) :

$$n = \frac{NZ^2 \cdot p(1-p)}{Nd^2 + Z^2 \cdot p(1-p)}$$

Dari jumlah populasi sebanyak 2.520 maka besarnya sampel diperoleh (n) adalah 90

responden. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan deskriptif komparatif.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat pendidikan responden dalam penelitian ini menjadi salah satu acuan untuk menganalisis bagaimana penyerapan tenaga kerja dari usaha kecil dan menengah serta bagaimana hubungannya terhadap pengurangan tingkat kemiskinan di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung. Berdasarkan tingkat pendidikan, frekwensi responden yang paling besar adalah responden yang telah mengenyam pendidikan sekolah dasar yaitu sebanyak 30 orang atau sekitar 33,3 persen dan yang terendah frekuensi terendah adalah responden yang telah mengenyam pendidikan sekolah menengah kejuruan (SMK) atau SMEA yaitu sebanyak 3 orang atau sebesar 3,3 persen. Data rincinya disajikan di Tabel 3.

**Tabel 3. Tingkat pendidikan Responden di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung**

| No    | Tingkat Pendidikan  | Frekuensi | Persentase |
|-------|---|-----------|------------|
| 1     | Tidak Sekolah   | 9         | 10.0       |
| 2     | Sekolah Dasar (SD)  | 30        | 33.3       |
| 3     | Sekolah Menengah Pertama (SMP)                            | 20        | 22.2       |
| 4     | Sekolah Menengah Atas (SMA)                               | 28        | 31.1       |
| 5     | Sekolah Menengah (SMEA) / Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) | 3         | 3.3        |
| Total |   | 90        | 100.0      |

Sumber: Data diolah dari hasil penelitian 2011

Tingkat pendidikan responden dalam penelitian ini menjadi salah satu acuan untuk menganalisis bagaimana penyerapan tenaga kerja dari usaha kecil dan menengah serta bagaimana hubungannya terhadap pengurangan tingkat kemiskinan di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung. Berdasarkan tingkat pendidikan, frekwensi responden yang paling besar adalah responden yang telah mengenyam pendidikan sekolah dasar yaitu sebanyak 30 orang atau sekitar 33,3 persen dan yang terendah frekuensi terendah adalah responden yang telah mengenyam pendidikan sekolah menengah kejuruan (SMK) atau SMEA

yaitu sebanyak 3 orang atau sebesar 3,3 persen.

#### Penyerapan Tenaga Kerja.

Jenis pekerjaan responden merupakan hal yang penting dalam membantu menganalisis dan menjawab pertanyaan penelitian ini. Frekuensi responden terbanyak adalah petani sebesar 30 dengan presentase sebesar 33,3 persen, selanjutnya frekuensi buruh bangunan sebesar 17 dengan presentase sebesar 18,89 persen dan frekwensi pedagang serta pengerajin kayu masing-masing sebesar 10 dengan persentase sebesar 11,1 persen. Frekuensi terendah berasal dari responden yang

bekerja sebagai buruh toko bangunan, buruh traktor, serta pekerja pengerajin cengkeh dimana frekuensi masing-masing adalah 1 dengan persentase sebesar 1,1 persen.

Perluasan kesempatan kerja yang sedemikian besar jumlahnya mutlak diperlukan untuk menangani pertambahan jumlah angkatan kerja yang sedemikian besar agar estimasi tersebut menjadi kenyataan. Bersamaan dengan upaya perluasan kesempatan kerja yang luas, pemberdayaan upah setara dengan standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL), bahkan apabila mungkin lebih besar daripada KHL, merupakan hal yang penting pula agar barisan pekerja miskin tidak cepat

bertambah panjang. Program-program aksi peningkatan tenaga kerja dan peningkatan upah pekerja menjadi prioritas utama. Perlu disadari memang bahwa jumlah penganggur dan setengah penganggur tidak dapat dihapuskan, tetapi dikendalikan agar tidak bertambah dan bila mungkin dapat diturunkan. Hal itu adalah salah satu sasaran utama dalam pembangunan ketenagakerjaan di Pembangunan Era Millenium (*Millenium Development Goals-MDGs*). Dari hasil yang dilakukan di Kecamatan Abiansemal dimana respondenya adalah Rumah tangga miskin yang berjumlah 90 responden. Datanya dapat disajikan di Tabel 4 berikut.

**Tabel 4. Jumlah Tenaga Kerja yang Terserap Per Sektor**

| No    | Jenis Pekerjaan            | Frekuensi | Persen |
|-------|----------------------------|-----------|--------|
| 1     | Buruh bangunan             | 17        | 18,89  |
| 2     | Buruh Industri genteng     | 4         | 4.4    |
| 3     | Buruh Peternak babi        | 2         | 2.2    |
| 4     | Buruh Toko bangunan        | 1         | 1.1    |
| 5     | Buruh traktor              | 1         | 1.1    |
| 6     | Karyawan pada Rumah Makan  | 3         | 3.3    |
| 7     | Karyawan Bengkel           | 2         | 2.2    |
| 8     | Karyawan garmen            | 2         | 2.2    |
| 9     | Petani                     | 30        | 33.3   |
| 10    | Karyawan Perusahaan Batako | 2         | 2.2    |
| 11    | Sopir                      | 3         | 3.3    |
| 12    | Pedagang                   | 10        | 11.1   |
| 13    | Pekerja pengerajin kayu    | 10        | 11.1   |
| 14    | Karyawan Mini Market       | 2         | 2.2    |
| 15    | Pekerja kerajinan cengkeh  | 1         | 1.1    |
| Total |                            | 90        | 100.0  |

Sumber: Data Diolah dari hasil Penelitian 2011

Tabel 4 menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja yang paling banyak tertampung pada sektor pertanian sebanyak 30 responden atau sebesar 33,3persen yang diikuti oleh buruh bangunan sebesar 17 responden atau 18,89 persen serta di ikuti oleh sector perdagangan dan pengerajin kayu masing-masing 10 responden atau masing sebesar 11,1 persen dan yang paling rendah pada buruh toko bangunan, buruh traktor,dan pekerja kerajinan cengkeh masing-masing 1 responden atau sebesar 1,1 persen.

Setelah dilakukan pengamatan secara seksama, maka responden yang bekerja sendiri sebagai pedagang dan petani berjumlah 40 responden atau sebesar 44,44 persen dan selaku pekerja atau buruh mencapai 50 responden atau 55,56 persen. Kendatipun yang terserap pada sektor UKM sebanyak 55,56 persen, hal ini berarti menunjukkan kecendrungan yang relatif rendah. Kondisi yang menyebabkan rendah nya para pekerja dari rumah tangga miskin yang mampu terserap pada UKM disebabkan karena tingkat pendidikan yang relatif rendah atau ketrampilan yang dimiliki

responden juga relatif rendah. Tenaga kerja sebagai buruh yang tertampung pada UKM sebanyak 25 responden dan 25 responden sebagai karyawan.

### Jam Kerja Responden

Frekuensi jam kerja tertinggi dari pada responden yang bekerja sekitar 8 jam perhari adalah sebesar 48 dengan presentase sebesar 53.3 persen. Frekwensi jam kerja terendah dari responden yang bekerja sekitar 4 jam adalah sebanyak 2 responden atau sebesar 2,2 persen. Data lebih rinci dapat disajikan di Tabel 5 berikut.

**Tabel. 5 Jam Kerja Responden**

| No    | Jam kerja |           |        |
|-------|-----------|-----------|--------|
|       | Jam Kerja | Frekuensi | Persen |
| 1     | 4         | 2         | 2.2    |
| 2     | 5         | 5         | 5.6    |
| 3     | 6         | 5         | 5.6    |
| 4     | 7         | 6         | 6.7    |
| 5     | 8         | 48        | 53.3   |
| 6     | 9         | 10        | 11.1   |
| 7     | 10        | 9         | 10.0   |
| 8     | 11        | 2         | 2.2    |
| 9     | 12        | 3         | 3.3    |
| Total |           | 90        | 100.0  |

Sumber: Data Diolah dari hasil Penelitian 2011

Tabel 5 menunjukkan bahwa pemanfaatan waktu oleh responden sebanyak 78 responden atau sebanyak 86,67 persen memanfaatkan waktu secara penuh, sedangkan yang menggunakan waktu dibawah 35 jam seminggu sebanyak 12 responden atau sebesar 13,33 persen. Masalah setengah pengangguran muncul setelah masalah pengangguran terbuka dirasakan sebagai kurang mewakili permasalahan sebenarnya dari ketenaga kerjaan di negara-negara sedang berkembang (Manning dan Papayungan, 1994). Dikemukakan oleh Esmara (1986) bahwa kesukaran memperkirakan pemakaian tenaga kerja tidak penuh dalam kelompok pekerja jauh lebih sulit dibandingkan dengan kelompok yang belum bekerja. Usaha-usaha dalam memperkirakan tingkat pemakaian tenaga kerja di kalangan

kelompok pekerja ini telah dipergunakan baik pendekatan kuantitatif maupun kualitatif.

Pendekatan kuantitatif memfokuskan perhatian ke arah pemakaian jam kerja dalam seminggu yang dengan tepat dapat ditentukan secara kuantitatif. Seseorang yang bekerja kurang dari suatu patokan jam kerja penuh dalam hal ini 35 jam seminggu dianggap masih berada dalam keadaan setengah pengangguran.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang dipaparkan di atas, maka beberapa yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut.

- 1). Tingkat pendidikan responden yang paling banyak adalah SD sebesar 33,3 persen yang di ikuti dengan SMA sebesar 31,1 persen, dan paling terkecil adalah SMK sebanyak 3,3 persen.
- 2). Jumlah tenaga kerja yang paling banyak tertampung pada sector pertanian sebanyak 30 responden atau sebesar 33,3persen yang diikuti oleh buruh bangunan sebesar 17 responden atau 18,89 persen serta di ikuti oleh sector perdagangan dan pengerajin kayu masing-masing 10 responden atau masing sebesar 11,1 persen dan yang paling rendah pada buruh toko bangunan, buruh traktor,dan pekerja kerajinan cengkeh masing-masing 1 responden atau sebesar 1,1 persen.
- 3). Penyerapan tenaga kerja pada UMKM sebesar 50 responden atau 55,56 persen yang disebabkan tingkat keterampilan yang dimiliki sangat rendah.
- 4). Waktu bekerja dari responden menunjukkan bahawa pemanfaatan waktu oleh responden sebanyak 78 responden atau sebanyak 86,67 persen memanfaatkan waktu secara penuh, sedangkan yang menggunakan waktu dibawah 35 jam seminggu sebanyak 12 responden atau sebesar 13,33 persen.
- 5). Pendapatan responden yang menerima sesuai dengan upah minimum dan diatas upah minimum adalah sebanyak 26 responden (28,89 persen) dan yang menerima upah dibawah upah minimal adalah sebanyak 64 responden (71,11 persen).

### Saran

Mengingat UKM mempunyai peranan strategis dalam penyerapan tenaga kerja dan pendapatan miskin maka penulis menyarankan kepada Pemerintah Kabupaten Badung untuk mendorong perkembangan UKM di Kecamatan Abiansemal melalui pemberian bantuan baik dibidang permodalan maupun pelatihan dalam rangka meningkatkan kinerja UKM di Kabupaten Badung.

### REFERENSI

- Anonym, 2009, Inventarisasi Usaha Kecil Dan Menengah di Kabupatrn Badung, Kerjasama dengan Fakultas Ekonomi Unud dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung.
- Anonym, 2005, Pedoman Pengembangan Kewirausahaan, *Basik Penumbuhan Wirausaha Baru*. Kementerian Koperasi dan UKM, Deputi Bidang Pengembangan Sumberdaya. Jakarta.
- Anonym, 2010, *Profil Kabupaten Badung*, BPS Kabupaten Badung
- Chris Maning, Mikhael Papayungan, 1984, Analisis Ketenagakerjaan di Indonesia Berdasarkan Sensus Penduduk 1971-1980, Pusat Penelitian dan Studi Kependudukan, UGM Yogyakarta.
- Esmara, Hendra. 1982, *Rencana Perluasan Kesempatan Kerja Dalam Repelita IV, Sebuah Gagasan*, Prisma, no 4.
- Garna,H Yudistira K,2000, *Metede Penelitian Sosial; Penelitian dalam Ilmu Pemerintahan*; Primaco Akademika, Bandung
- Gregory Mankiw.N, 2000, *Teori Makro Ekonomi*, Edisi Keempat,Penerbit Erlangga, Jakarta.